

## PRESEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMERATAAN PENGGUNAAN APBD DALAM PEMBANGGUNAN PADA DESA WINONG KABUPATEN TULUNGAGUNG

Maulana Ikhrom Ababil, Hwihanus  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail : [11212322@suret.untag-sby.ac.id](mailto:11212322@suret.untag-sby.ac.id) [hwihanus@untag-sby.ac.id](mailto:hwihanus@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

*This research aims to analyze the effectiveness of the allocation and implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in the education, tourism, road repair, etc. sectors in Winong Village, Tulungagung Regency. Using qualitative research methods with a case study approach, data was collected through in-depth interviews with heads, and community representatives.. The research results show that the APBD allocation for the education sector is still unbalanced, with more focus on developing physical infrastructure rather than improving the quality of human resources. Apart from that, community participation in the APBD preparation process is still low and is only a formality. The factor of delays in budget disbursement is also an obstacle in the implementation of educational programs, which has a negative impact on program effectiveness. The lack of transparency in budget management adds to the challenges in creating good public accountability. This research concludes that improving the quality of APBD management needs to be supported by improvements in determining allocation priorities, increasing public participation, more efficient management of budget disbursement, and higher transparency. Recommendations are given to local governments to pay more attention to balancing budget allocations and involve the community more substantially in the decision-making process.*

### Article History

Received: Oktober 2024  
Reviewed: Oktober 2024  
Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan prioritas pembangunan serta alokasi sumber daya publik. APBD memiliki peran sentral dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memenuhi kebutuhan publik. Namun, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sering menjadi isu yang hangat dibicarakan, terutama terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses perencanaan dan pelaksanaan APBD di suatu daerah di desa winong kabupaten tulungagung, dengan fokus pada transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana para pemangku kepentingan, seperti anggota legislatif, eksekutif, dan masyarakat, berkontribusi dalam proses tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta tokoh masyarakat, untuk menggali pandangan mereka mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Metode kualitatif dipilih karena mampu mengungkapkan perspektif para pemangku kepentingan secara rinci dan memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika serta konteks sosial-politik dalam pengelolaan APBD. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan APBD dan

menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran.

## Tinjauan Teori

Dalam penelitian mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami proses pengelolaan, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas keuangan daerah. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dinamika dalam perencanaan, penganggaran, dan implementasi APBD.

### 1. Teori Penganggaran Publik

Teori penganggaran publik menekankan pentingnya perencanaan dan alokasi sumber daya publik untuk mencapai tujuan pembangunan. Menurut Mikesell (2011), penganggaran publik adalah proses yang tidak hanya teknis tetapi juga politis, karena melibatkan negosiasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks APBD, teori ini membantu menjelaskan bagaimana pemerintah daerah menentukan prioritas pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan masyarakat. Penganggaran yang efektif seharusnya mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

### 2. Teori Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam pengelolaan APBD. Menurut Hood (1991), teori akuntabilitas menekankan perlunya pelaporan dan pengawasan untuk memastikan bahwa anggaran publik dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Dalam penelitian ini, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam setiap tahap pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

### 3. Teori Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pengelolaan APBD merupakan hal yang esensial untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat diakomodasi dalam proses penganggaran. Arnstein (1969) dalam teorinya tentang tangga partisipasi menyebutkan bahwa partisipasi publik mencakup berbagai tingkat, mulai dari manipulasi hingga keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks APBD, partisipasi publik diharapkan tidak hanya pada tahap konsultasi, tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang berarti untuk pengelolaan anggaran daerah.

### 4. Teori Good Governance

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) juga menjadi landasan teori yang penting dalam pengelolaan APBD. Menurut UNDP (1997), good governance mencakup prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Good governance dalam konteks APBD menuntut agar pemerintah daerah mengelola anggaran secara efektif dan efisien, dengan melibatkan masyarakat serta menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dalam penelitian ini, teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan good governance dalam pengelolaan APBD. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berfokus pada interaksi antara para pemangku kepentingan, dinamika yang terjadi selama proses penganggaran, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan APBD.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan data dalam penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Menurut Saryono (2012) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Meleong (2012: 97) subjek penelitian adalah sumber informasi pada penelitian yang dibutuhkan untuk pengumpulan data. Adapun sumber atau yang menjadi subjek dalam penelitian adalah warga RT 1 sampai dengan warga RT 7 serta beberapa staff dalam kantor kepala desa. subjek penelitian adalah sumber informasi pada penelitian yang dibutuhkan untuk pengumpulan data.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Penelitian yang menggunakan format kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, dan berbagai fenomena yang ada di masyarakat.

Analisis penelitian ini dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian hingga penelitian berakhir. Hingga diperoleh data dari lapangan baik dari hasil observasi dan wawancara langsung dipelajari dan dirangkum, ditelaah dan dianalisis sampai akhir penelitian. Setelah data yang diperoleh dilapangan melalui observasi dan wawancara terkumpul dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif selanjutnya pembahasan data disimpulkan secara deskriptif yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan bersifat umum menuju ke pertanyaan yang bersifat khusus, dengan menggunakan Model Miles dan Humberman (2011)

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil tempat penelitian di Desa winong kabupaten tulungagung. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 sampai 23 Oktober 2024.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi yaitu : Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Meleong (2016: 186).

Proses penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka maupun tanpa muka yaitu melalui media telekomunikasi atau wawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam sebuah penelitian atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang sebelumnya. Wawancara merupakan teknik percakapan berupa tanya jawab yang diarahkan pada guru persoalan tertentu untuk mendapatkan sebuah dengan informasi atau jawaban yang tepat atau akurat. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara terstruktur. Langkah yang akan ditempuh dalam melakukan wawancara tak terstruktur adalah sebelum dilakukan wawancara. Peneliti harus belajar bahasa, perlu memperhatikan strategi-strategi nonverbal yang kemungkinan mempengaruhi jalannya wawancara.

## Hasil Penelitian

Pemaparan hasil penelitian, disajikan dalam bentuk naratif, hasil biasanya didasarkan pada kategori tematik atau pola yang ditemukan dari analisis data dan kutipan langsung dari responden sering digunakan untuk mendukung temuan.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil

### 1. Alokasi Anggaran yang Tidak Proporsional

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan beberapa staff kantor kepala desa, ditemukan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan lebih banyak diarahkan pada hal yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan seperti gedung sekolah yang masih jadi satu dengan kantor kepala desa daripada membangun gedung untuk sekolah dan peningkatan kualitas guru dan kurikulum. Hal ini mengakibatkan terbatasnya dukungan untuk pelatihan guru dan program peningkatan mutu pendidikan serta tempat nyamanya untuk anak-anak sekolah.

Ditemukan juga bahwa alokasi anggaran untuk sektor pariwisata lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak berjangka panjang dan juga jalan-jalan yang diperbaiki hanya beberapa saja tidak semuanya.

### 2. Minimnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD

Informasi dari wawancara mendalam dengan perwakilan masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD masih sangat rendah. Masyarakat umumnya tidak mendapatkan akses informasi mengenai rapat perencanaan anggaran, sehingga tidak banyak yang turut serta dalam musyawarah. Banyak responden menyatakan bahwa mereka hanya dilibatkan dalam hal-hal yang bersifat formalitas.

### 3. Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, ditemukan kurangnya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran. Informasi terkait penggunaan anggaran sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka tetapi hanya pemasukan APBD serta pemasukan yang lainnya serta pengeluaran dana yang tidak terbuka, yang menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat mengenai efektivitas alokasi dana.

## Pembahasan

#### 1) Kesenjangan dalam Prioritas Alokasi Anggaran

Temuan mengenai alokasi anggaran yang lebih condong ke pembangunan infrastruktur menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman kebutuhan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung fokus pada aspek yang lebih terlihat seperti wisata kebun sayur daripada peningkatan kualitas pendidikan yang lebih berkelanjutan. Pembahasan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa banyak pemerintah daerah lebih mengutamakan proyek fisik untuk menunjukkan hasil pembangunan yang cepat terlihat kepada masyarakat.

#### 2) Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi. Beberapa responden mengungkapkan bahwa proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak dijalankan dengan optimal, sehingga aspirasi mereka tidak dapat tersalurkan dengan baik. Hasil ini sejalan dengan teori partisipasi Arnstein (1969), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tidak substansial hanya akan menjadi "tokenism" tanpa ada pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan.

#### 3) Transparansi Sebagai Kunci Akuntabilitas

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, anggaran pariwisata, anggaran perbaikan jalan mengakibatkan kurangnya akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap laporan keuangan desa, yang menyebabkan spekulasi negatif terhadap penggunaan anggaran. Untuk meningkatkan akuntabilitas, diperlukan strategi komunikasi yang lebih baik dari kepala desa, termasuk pelaporan yang dapat diakses secara publik dan pemberdayaan lembaga pengawas independen.

## Simpulan

Setelah dilakukan penelitian di desa Winong kabupaten tulungagung, dimana penelitiannya dilakukan pada tanggal 17-23 Oktober 2024. Presepsi masyarakat terhadap pemerataan penggunaan APBD dalam pembangunan desa. Disini hasil penelitiannya diperoleh dengan metode wawancara yang dilakukan pada beberapa masyarakat desa winong kabupaten tulungagung

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat desa winong menjelaskan bahwa disini peran kepala desa dan masyarakat sangat dituntut untuk ikut andil dalam pengelolaan APBD desa. Kepala desa harus bisa memilih mana yang memenag di perioritaskan dalam penggunaan anggaran APBD serta masyarakat harus mengetahui anngaran APBD akan dikemanakan.

Kepala desa juga harus melibatkan masyarakat dalam penggunaan anggaran seperti dalam rapat rancangan anggaran, jika masyarakat ikut dalam rapat rancangan maka masyarakat dapat mengajukan ide atau menyampaikan kekurangannya dalam suatu daerah(RT).

Dan juga kepala desa harus memulai memasang benner pemasukan dan pengeluaran dana anggaran APBD, agar masyarakat mengetahui dana anggaran APBD larinya kemana serta masyarakat dapat melihat bukti nyatanya, jika begitu masyarakat akan mulai percaya dengan kepala desa karena dana anggran larinya jelas .

## Saran

- Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kembali prioritas alokasi anggaran untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama, selain pembangunan infrastruktur.
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif dan transparan mengenai musrenbang dan pentingnya partisipasi dalam penyusunan APBD.
- Memperbaiki sistem manajemen keuangan daerah untuk mengurangi keterlambatan pencairan anggaran, misalnya dengan memperkuat koordinasi antara dinas terkait.
- Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi pengelolaan anggaran secara terbuka melalui platform online yang mudah diakses oleh publik.

## Daftar Pustaka

<http://repository.stiemahardhika.ac.id/3499/3/JURNAL%20-%20BEDY%20SATRIA%20RIZKY%20WIJAYA%20-%2016350023.pdf>. (n.d.).

<https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/11200/6229>. (n.d.).

<https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/jisacc/article/download/901/485>

<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/download/799/157/2766>

<https://journal.untar.ac.id/index.php/PSENAPENMAS/article/view/15156/8702>